

**LAPORAN HASIL PENELITIAN
DANA PENELITIAN PNBP FAKULTAS**



**PENGARUH PEMAHAMAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
TERHADAP KINERJA SKPD PADA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

Oleh

USMAN, S.Pd.,SE., MSi

LUKMAN PAKAYA,S.Pd.,MSA

**JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

2014

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja SKPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango

1. Ketua Peneliti

A. Nama Lengkap : Usman, S.Pd, SE.,MSi
 B. NIDN : 0024067702
 C. Jabatan Fungsional : Lektor
 D. program Studi : S1 Akuntansi
 E. Nomor Hp : 085298116873
 F. surel (e-mail) : -

Lama Penelitian : 3 bulan
 Penelitian tahun ke : 1
 Biaya penelitian : Rp. 5.000.000
 Biaya tahun berjalan : -Diusulkan kelembaga : Rp.5.000.000
 -Dana internal PT :-
 - dana intitusi lain :-

Gorontalo, 20 November 2014


Mengetahui,
 Dekan



Dr. Hamzah Yunus, M.Pd
 NIP. 196002231986031004



Ketua Peneliti



Usman, S.Pd., SE., M.Si
 NIP. 197706242008121002

Menyetujui,
 Ketua Lembaga Penelitian



Dr. Fitriyane Lihawa, M.Si
 NIP. 196912091993032001



ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo, Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala SKPD, Sekretaris SKPD, Kepala Bagian/Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dari 26 SKPD yang berada di Kabupaten Bone Bolango, dengan jumlah aparat sebanyak 383 aparat yang dianggap memiliki peranan penting dalam pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah, sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 95 orang aparat dari beberapa SKPD pada pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang dibagikan kepada responden serta didukung oleh data sekunder yang ada pada pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo dengan menggunakan regresi sederhana. Penelitian ini diduga bahwa pemahaman sistem akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SKPD pada pemerintah daerah kab. Bone bolango. Hal ini dibuktikan dengan hasil koefisien regresi sebesar 0,161 menunjukkan setiap peningkatan 1% pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah akan mampu meningkatkan kinerja SKPD pada pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango sebesar 0,161%.

Kata Kunci: SAKDA, Kinerja SKPD

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan penelitian ini. Tak lupa pula shalawat dan salam saya khaturkan kepada Rasulullah SAW, sebagai Nabi akhir zaman.

Penyusunan laporan ini dimaksudkan sebagai bukti pertanggungjawaban kami dalam menjalankan amanah selaku tim peneliti, sekaligus sebagai tindak lanjut dari surat keputusan dekan fakultas ekonomi dan bisnis universitas negeri gorontalo

Secara riil disadari bahwa dalam laporan penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kritikan dan saran yang bersifat membangun dari pembaca, peneliti menerima dengan senang hati demi perbaikan penulisan selanjutnya. Dan semoga laporan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan berbagai pihak yang berkeinginan untuk menyempurnakan keterbatasan hasil penelitian ini. A..min.

Gorontalo, Nopember 2014

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..	i
HALAMAN PENGESAHAN.	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI..	v
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar.....	.ix
Daftar Lampiran.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Rumusan Masalah	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah	8
2.1.1 Prosedur akuntansi keuangan daerah	13
2.1.2 Ciri-Ciri Akuntansi Keuangan Daerah.....	14
2.1.3 Kinerja Pemerintah Daerah.....	17
2.1.3.1 Pengertian Kinerja Pemerintah Daerah.....	17
2.1.3.2 Indikator Kinerja Pemerintah Daerah.....	19
2.2 Kajian Penelitian Terdahulu.....	22
2.3 Kerangka Berpikir.....	23
2.4 Hipotesis.....	24

BAB III TUJUAN DAN MANFAAT	25
3.1 Tujuan Penelitian	25
3.2 Manfaat Penelitian.....	25
BAB IV METODE PENELITIAN	26
4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	26
4.2 Metode Penelitian	26
4.3 Desain Penelitian.....	27
4.4 Definisi Operasional Variabel.....	28
4.5 Populasi dan Sanpel.....	29
4.6 Teknik Pengumpulan Data dan instrument Penelitian.....	30
4.6.1 Teknik Pengumoulan Data.....	30
4.6.2 Instrumen Penelitian.....	31
4.7 Prosedur Pengujian instrument Penelitian.....	32
4.7.1 Uji Validitas instrumen.....	32
4.7.2 Uji Reabilitas.....	34
4.8 Teknik Analisa Data.....	35
4.8.1 transformasi data.....	53
4.8.2 Uji Normalitas.....	53
4.8.3 Analisis Regresi Sederhana.....	36
4.9 Pengujian Hipotesis.....	37
4.9.1Koefisien Determinasi.....	38
BAB V Hasil dan Pembahasan.....	39
5.1 Hasil Penelitian.....	39
5.1.1 Gambaran Umum lokasi Penelitian.....	39
5.1.2 Karakteristik Responden berdasar Jenis Kelamin.....	40

5.1.3 Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat pendidikan.	41
5.1.4 karakteristi Responden berdasar Lama menjabat.	42
5.1.4.1 hasil pengujian Validitas.....	42
5.1.4.2 Hasil Pengujian Realibilitas.....	44
5.1.5 Transformasi data dengan metode MSI.....	45
5.1.6 Hasil uji asumsi klasik.....	45
5.1.7 Pengujia Hipotesis.....	49
5.1.8 Hasil Koefisien Determinasi.....	52
5.2 Pembahasan.....	53
5.2.1 Pengaruh Pemahaman SAKDA Terhadap Kinerja SKPD Boalemo.....	53
BAB VI Kesimpulan dan Saran.....	57
6.1 Simpulan.....	57
5.2 Saran.....	58
Daftar Pustaka	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam era otonomi daerah ini, masyarakat semakin menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dan lebih dapat menyampaikan aspirasi yang berkembang yang salah satunya perbaikan terhadap pengelolaan keuangan pada instansi-instansi pemerintah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedua Undang-undang ini telah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah dalam mengatur sumber dana, menentukan arah, tujuan, dan target penggunaan anggaran.

Dalam situasi tertentu akuntansi menjadi salah satu kendala teknis bagi eksekutif dalam pengelolaan keuangan daerah. Newkirk (1986: 23) dalam Syahrída (2009) menegaskan bahwa dari sekian banyak problem yang ada pada pemerintah daerah salah satunya adalah tentang akuntansi. Pernyataan ini menandakan bahwa pengelola keuangan daerah pada masing-masing satuan kerja perlu dilakukan secara cermat guna dapat menyelesaikan problem akuntansi dan dapat melakukan penyajian informasi keuangan secara memadai. Mardiasmo (2004: 35) menegaskan bahwa sistem pertanggungjawaban keuangan suatu institusi dapat berjalan dengan baik, bila terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik pula. Ini berarti pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam APBD memiliki posisi strategis dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang akuntabel. Pemahaman sistem akuntansi merupakan faktor lain yang perlu dicermati,

karena untuk dapat menyajikan informasi keuangan yang memadai dalam bentuk pelaporan keuangan yang dapat dipahami oleh pengguna, maka harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah, serta harus memahami sistem akuntansi, khususnya akuntansi keuangan daerah.

Pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Namun dalam hal penyusunan laporan keuangan tersebut pemerintah daerah belum sepenuhnya memahami system akuntansi yang sekarang berlaku yaitu basis kas menuju basis akrual. Hal ini dipertegas oleh kepala bagian akuntansi pada DPPKAD kabupaten Bone Bolango Andi Idham. Beliau menyatakan bahwa “Basis kas menuju akrual yang saat ini diterapkan belum semua dipahami oleh masing-masing entitas akuntansi maupun entitas pelaporan, sudah harus diberlakukan basis yang baru dalam tahun 2015 yaitu basis akrual menjadi alasan perlunya dilakukan pelatihan tenaga akuntansi. Pelatihan sebaiknya langsung terhadap praktik-praktik real di lapangan disertai dengan contoh-contoh soal akan tetapi dengan tidak meninggalkan pemahaman teori akuntansi pemerintahan. Peningkatan SDM akuntansi ini menjadi modal penting dalam penerapan akuntansi berbasis akrual”. Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan bahwa masih perlunya pemahaman tentang system akuntansi keuangan daerah dalam suatu instansi pemerintahan di Kabupaten Bone Bolango.

Dalam sistem pemerintah daerah terdapat 2 subsistem, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Laporan keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun laporan keuangan SKPKD, oleh

karena itu setiap SKPD harus menyusun Laporan Keuangan sebaik mungkin. Dalam menyusun laporan keuangan inilah dibutuhkan yang namanya transparansi dan akuntabilitas. Oleh sebab itu akuntansi keuangan daerah memegang peranan penting dalam perbaikan manajemen keuangan daerah sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sebagaimana kita ketahui akuntansi keuangan daerah berfungsi menghasilkan *output* berupa laporan keuangan yang akan menjadi dasar bagi penilaian kinerja pemerintah itu sendiri maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemerintah daerah (*stakeholders* pemerintah daerah). Selama ini pelaporan keuangan pemerintah, baik di pusat maupun daerah terkesan belum memenuhi kebutuhan informasi pemakainya. Kurangnya informasi yang dihasilkan mengakibatkan pemerintah tidak mempunyai manajerial yang baik dan tidak bisa mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan harapan masyarakat dan *stakeholders* lainnya. Hal ini berdasarkan hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah pusat pada tahun 2012 memperoleh predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Kebijakan yang memberikan keleluasaan bagi Pemda untuk mengelola keuangan daerahnya seharusnya bisa meningkatkan kinerja keuangan daerah yang bersangkutan. Banyaknya pembahasan mengenai keuangan daerah, terutama hubungannya dengan otonomi daerah yang sementara berlangsung menjadikan hal ini menarik untuk dibahas, peneliti memilih salah satu kabupaten di Provinsi Gorontalo, yaitu Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten ini menjadi menarik sebagai salah satu tempat penelitian karena kabupaten ini masih tergolong kabupaten muda yang terbentuk pada tahun 2003, oleh karena itu ketidakpahaman tentang pengelolaan keuangan daerah dan kurangnya sumber

daya yang memadai dalam melaksanakan system akuntansi keuangan daerah, seperti yang diutarakan oleh kepala bagian Akuntansi DPPKAD Kabupaten Bone Bolango mengatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah belum sepenuhnya dipahami oleh masing-masing entitas akuntansi maupun entitas pelaporan, serta masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango yakni sebagian besar APBD Kabupaten Bone Bolango berasal dari Pemerintah Pusat menjadi alasan utama peneliti memilih Kabupaten Bone Bolango menjadi tempat penelitian. Selain itu dalam kinerja instansi pemerintah daerah Bone Bolango berdasarkan hasil audit BPK masih di bawah harapan dari masyarakat maupun *stakeholder*. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

**Tabel 1: Penilaian BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bone Bolango selama 3 Tahun Terakhir**

TAHUN	PENILAIAN BPK	PERMASALAHAN DALAM LAPORAN KEUANGAN
2010	WDP	1. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan, pengeluaran kas pada rekening penampungan yang dikuasai oleh Kuasa BUD tidak dapat dijelaskan dengan dokumen/bukti-bukti pengeluaran sebesar Rp23.923.678.534,00 sehingga transaksi pengeluaran tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya, berpotensi merugikan keuangan negara/daerah; 2. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan, saldo <i>cash on hand</i> Kas Daerah sebesar Rp472.242.822,00 yang tersaji dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango tidak dapat diyakini kewajarannya karena adanya penggunaan untuk kepentingan pribadi (Kuasa BUD) yang merugikan keuangan daerah minimal sebesar Rp209.097.931,00; 3. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern, pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap belum dilakukan sesuai ketentuan sehingga nilai Aset Tetap pada Neraca sebesar Rp27.530.998.132,00 tidak diyakini kewajarannya.

2011	WDP	<ol style="list-style-type: none"> 1. mutasi persediaan 31 Desember 2011 tidak dicatat secara memadai 2. aset tetap pada 31 Desember tidak dapat dirinci perjenis dan objek aset. 3. Antara bidang akuntansi, bidang aset dan SKPD tidak melakukan rekonsiliasi pencatatan sehingga terjadi perbedaan nilai aset tetap yang disajikan dalam neraca dan daftar aset pada BPKAD dan KIB di SKPD tidak didukung dengan pencatatan yang memadai, sehingga penyajian pada neraca per 31 desember 2011 tidak dapat diyakini kewajarannya.
2012	WDP	<p>penyajian aset tetap per 31 Desember 2012, yaitu terdapat Aset Tetap yang belum dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp96.677.501.720,30 yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak dapat diketahui keberadaannya sebesar Rp16.002.569.966,30; 2. biaya perencanaan, pengawasan dan rehabilitasi yang belum dikapitalisasi ke aset terkait pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp11.252.037.626,00 dan pada Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp64.151.950.964,00; 3. biaya ganti rugi tanaman dan bangunan sebesar Rp1.952.893.699,00 belum dikapitalisasi ke Aset Tanah terkait; dan 4. Aset tetap lainnya berupa hewan ternak dan buku-buku sebesar Rp3.318.049.465,00 tidak dapat diketahui keberadaannya serta tidak dapat dirinci item jenis asetnya.

(sumber: BPK.GO.ID)

Berdasarkan tabel di atas membuktikan bahwa kinerja dari pemerintah daerah kabupaten Bone Bolango masih jauh dari harapan masyarakat terutama dalam hal pengelolaan aset yang selama 3 tahun terakhir menjadi masalah utama. Kedua dalam hal pencatatan, dan perincian aset berdasarkan jenisnya juga menjadi permasalahan, hal ini menjadi tolak ukur tentang kurangnya pemahaman system akuntansi keuangan pada pemerintah daerah yang mengakibatkan pula Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Daerah Kabupten Bone bolango hanya mendapat nilai C pada tahun 2013. Selain itu dalam hal realisasi anggaran selama 3 tahun terakhir belum sepenuhnya optimal seperti yang dapat digambarkan dalam tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bone Bolango tahun 2011 s/d 2013

Tahun	Anggaran	Realisasi	Capaian
2011	Rp. 890.857.361.031,61	Rp. 856.898.929.967,33	96%
2012	Rp. 920.341.456.748,83	Rp. 890.521.182.588,28	97%
2013	Rp. 1.118.115.295.318,99	Rp. 1.070.223.499.245,20	96%

(Sumber: DPPKAD Bone Bolango, 2014)

Berdasarkan tabel di atas, menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan daerah belum optimal sehingga mengakibatkan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango tidak dapat diselesaikan secara tepat waktu.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan melihat kemampuan Pemda Kabupaten Bone Bolango dalam memahami daerahnya serta bagaimana pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dapat mempengaruhi kinerja instansi Pemda Kabupaten Bone Bolango dengan mengangkat judul **“Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja SKPD pada Pemerintah Daerah Bone Bolango”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Kurangnya pemahaman tentang sistem akuntansi keuangan daerah dalam menyusun laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.
- b. Kurang efektif dan efisiennya kinerja pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dalam mengelola keuangan daerah sehingga mengakibatkan hasil penilaian kinerja Pemda Bone Bolango berdasarkan hasil audit BPK mendapat predikat wajar dengan pengecualian selama 3 Tahun terakhir.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan indentifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah Apakah Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual dengan proses elektronik dalam pengambilan data pembukuan dan pelaporan semua transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas seluruh entitas Pemerintah Daerah.

Herbert et.al (1984:3) menegaskan pada organisasi pemerintah terdapat dua atau kepentingan yang diperankan dalam menjalankan roda pemerintahan yaitu orientasi laba dan bukan laba. Orientasi laba pada pemerintah adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Oleh karena itu, pengelola administrasi pemerintahan perlu memahami akuntansi. Mereka juga harus memahami pelaporan akuntansi, dan juga memahami bagaimana informasi akuntansi digunakan untuk perencanaan, pembuatan keputusan dan pengendalian. Hal senada ditegaskan oleh Collier (1997 : 7) bahwa akuntansi memiliki implikasi terhadap hubungan antara pemegang kekuasaan dan lingkungan organisasi, serta sistem akuntansi manajemen merupakan suatu kekuatan yang mempengaruhi strategi. Ini menandakan bahwa untuk memediasi hubungan antara pemerintah daerah dengan *stakeholder* diperlukan suatu media untuk mengkomunikasikan program pemerintah. Salah satu media yang dipandang relevan dalam mengkomunikasikan dan dijadikan sebagai alat untuk mengawasi program-program pemerintah yang tercermin dalam APBD adalah sistem akuntansi daerah.

Pengertian Akuntansi sebagaimana dikemukakan oleh *Accounting Principle Board* (APB) yang memandang akuntansi dari sudut fungsinya sebagai berikut “Akuntansi adalah kegiatan jasa fungsinya menyediakan informasi kualitatif terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomis dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar diantara berbagai alternatif arah tindakan

Menurut Halim (2004: 138) “akuntansi adalah sebuah kegiatan jasa. Fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar diantara berbagai alternative tindakan”. Akuntansi meliputi beberapa cabang, antara lain akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dan akuntansi pemerintahan.

Sedangkan menurut Carmen (2012) “ *Accounting is a communication tool that favours communication and dialogue between the internal and external-actorsll, which imposes a permanent education and training*”. Yang mana akuntansi merupakan alat komunikasi yang mendukung komunikasi dan dialog antara internal dan eksternal aktor yang menetapkan pendidikan permanen dan pelatihan.

Hal ini terbukti bahwa akuntansi menjadi lebih diperlukan saat ini, untuk menjalin komunikasi antara pihak eksternal dan internal dari sebuah organisasi, dengan adanya sistem akuntansi maka informasi dari sebuah organisasi tersedia dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan baik pihak eksternal dan internal. Menurut Mulyadi (2001: 19) dalam widyaningsih (2011), bahwa tujuan umum pengembangan sistem akuntansi

diantaranya adalah untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru dan untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasinya.

Dalam dunia akuntansi dikenal adanya akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi Keuangan adalah akuntansi yang ditujukan untuk menyediakan informasi bagi pihak lain entitas pembuat laporan keuangan. Sedangkan akuntansi manajemen adalah akuntansi yang ditujukan untuk menyediakan informasi bagi pihak dalam entitas pembuat laporan keuangan. Oleh karena itu akuntansi keuangan daerah termasuk kedalam bagian akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, hal ini disebabkan karena akuntansi keuangan daerah menyediakan informasi bagi pihak luar dan dalam entitas pembuat laporan keuangan (Darise, 2009: 28).

Menurut Halim (2012: 40) akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (Kabupaten, Kota atau Provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi). Sedangkan sistem akuntansi keuangan daerah adalah prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak didalam dan diluar organisasi dari suatu entitas pemerintah daerah. Organisasi bebas merancang dan menerapkan berbagai prosedur yang diharapkan dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Akan tetapi karena informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak diluar organisasi telah diatur dalam Standar Akuntansi maka organisasi harus merancang sistem akuntansinya yang dapat

menghasilkan laporan keuangan sebagaimana ditetapkan dalam standar akuntansi untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan standar akuntansi.

Menurut Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 232 mengatakan bahwa “sistem akuntansi pemerintah daerah adalah Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Menurut Eko Hariyanto (2007: 10) dalam Muthi (2012) bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yaitu Serangkaian secara sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah”. Sedangkan menurut Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah Sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi, atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum.

Dalam sistem akuntansi keuangan daerah, contoh inputnya adalah Bukti memorial, Surat Tanda Setoran, dan Surat perintah membayar. Prosesnya adalah menggunakan catatan yang meliputi Buku Jurnal Umum, Buku jurnal penerimaan kas, buku jurnal pengeluaran kas, buku besar, dan buku pembantu. Sedangkan hasil dari akuntansi keuangan daerah berupa laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran

(LRA)”. Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). (Nunuy,2009: 18 dalam Muthi, 2012).

Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD), sedangkan sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) dilakukan oleh PPK-SKPD. Sistem akuntansi dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi. Yang dimaksud siklus akuntansi adalah tahap-tahap yang ada dalam sistem akuntansi. Menurut Sugiri (2001: 13) dalam Abdul Halim (2004: 42). Tahap-tahap tersebut meliputi:

1. Mendokumentasikan transaksi keuangan dalam buku dan melakukan analisis transaksi keuangan tersebut.
2. Mencatat transaksi keuangan dalam buku jurnal. Tahap ini disebut menjurnal.
3. Meringkas dalam buku besar, transaksi-transaksi keuangan yang sudah dijurnal. Tahap ini disebut posting atau mengakunkan.
4. Menentukan saldo-saldo buku besar di akhir periode dan menuangka dalam neraca saldo.
5. Menyesuaikan buku besar pada informasi yang paling *up-to-date* (mutakhir).
6. Menentukan saldo-saldo buku besar setelah penyesuaian dan menuangkan dalam neraca saldo setelah penyesuaian (NSSP).
7. Menyusun laporan keuangan berdasarkan neraca saldo setelah penyesuaian (NSSP).
8. Menutup buku besar.
9. Menentukan saldo-saldo buku besar dan menuangkannya dalam neraca saldo setelah tutup buku.

Menurut Masasi (1978), Gylmn (1993) dalam Mardiasmo (2004: 147-148) menjelaskan bahwa aturan dasar sistem akuntansi keuangan sebagai berikut:

1. Identifikasi
2. Pengklasifikasian
3. Adanya sistem pengendalian untuk menjamin reliabilitas
4. Menghitung pengaruh masing-masing operasi.

2.1.1 Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah

Halim, (2012: 84) Menjelaskan sistem akuntansi pemerintah daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi yaitu akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas, akuntansi selain kas, dan akuntansi asset, dan disempurnakan oleh permendagri menjadi 5 prosedur sistem akuntansi keuangan daerah yang meliputi sebagai berikut:

1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPKD adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Prosedur akuntansi pengeluaran kas adalah serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas pada SKPD dan/atau SKPKD

3. Prosedur Akuntansi Aset Tetap/Barang Milik Daerah

Prosedur akuntansi asset adalah serangkaian proses, baik manual maupun komputerisasi, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, hingga pemeliharaan, rehabilitas, penghapusan, pemindah tangan, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap asset yang dikuasai/digunakan skpd atau SKPKD. Prosedur akuntansi asset digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan asset yang dikuasai/digunakan SKPD atau SKPKD.

4. Prosedur Akuntansi Selain Kas

Prosedur akuntansi selain kas adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer

5. Penyajian Laporan Keuangan

Secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan.

2.1.2 Ciri-Ciri Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang mempunyai ciri-ciri tersendiri berbeda dengan akuntansi komersial, yaitu:

1. Tidak bertujuan untuk mengukur laba

Tujuan pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga harus memberikan informasi keuangan mengenai sumber-sumber yang digunakan untuk pelayanan dan dari mana sumber-sumber tersebut diperoleh.

2. Tidak adanya kepentingan pemilik

Pemerintah tidak memiliki kekayaan sendiri sebagaimana perusahaan. Bila asset melebihi hutang, maka kelebihan tersebut tidak dapat dibagikan kepada rakyat sebagaimana layaknya badan usaha komersial yang membagikan deviden pada akhir tahun buku.

3. Adanya akuntansi anggaran

Akuntansi anggaran mencakup akuntansi atas estimasi pendapatan, aprovisasi, estimasi pendapatan yang dialokasikan, otorisasi kredit anggaran (*allotment*) serta realisasi pendapatan dan belanja untuk pembuatan laporan yang menunjukkan atau membuktikan ketaatan dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam dokumen otorisasi kredit anggaran dan peraturan-peraturan pelaksanaan anggaran yang berlaku.

Kerangka umum sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Satuan kerja memberikan dokumen-dokumen sumber (DS) seperti Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dan Surat Tanda Setoran (STS) dari transaksi keuangannya kepada unit Keuangan Pemerintah Daerah.
- b. Unit Pembukuan dan Unit Perhitungan melakukan pembukuan bulanan (DS) tersebut dengan menggunakan komputer akuntansi (komputer yang telah disiapkan untuk keperluan akuntansi) termasuk perangkat lunak (*software*) akuntansi.

- c. Dari proses akuntansi tersebut dihasilkan jurnal sekaligus yang diposting ke dalam buku besar dan buku pembantu secara otomatis untuk setiap satuan kerja.
- d. Bila dokumen diatas telah diverivikasi dan benar maka dilanjutkan dengan proses komputer untuk pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).
- e. LPJ dikirimkan kepada Kepala Daerah sebagai pertanggungjawaban satuan kerja atas pelaksanaan anggaran, satu copy dikirim kepada satuan kerja yang bersangkutan untuk kebutuhan pertanggungjawaban dan manajemen, satu copy untuk arsip unit perhitingan.
- f. LPJ konsolidasi juga harus diberikan kepada Kepala Daerah agar dapat mengetahui keseluruhan realisasi APBD pada suatu periode.

Dalam sistem akuntansi keuangan daerah informasi yang dihasilkan oleh proses akuntansi berdasarkan SAP baru (PP No 71/2010) terdiri dari:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan perubahan SAL)
- 3) Neraca
- 4) Laporan Operasional (LO)
- 5) Laporan Arus Kas (LAK)
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Selain tujuh bentuk unsur laporan keuangan yang dikemukakan di atas, masing-masing daerah diharuskan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah, yaitu laporan keuangan badan usaha milik daerah, dan data yang berkaitan dengan

kebutuhan dan potensi ekonomi daerah. Data akuntansi yang dilaporkan, dikaitkan dengan data non finansial seperti data statistik memungkinkan instansi pemerintah untuk menilai efisiensi, sejauh mana sumber daya yang ada telah dimanfaatkan secara ekonomis dan penilaian efektifitas suatu instansi tersebut memberikan pelayanan maksimum dengan sumber yang tersedia, termasuk menilai apakah hasil suatu program dapat mencapai konsekuensi-konsekuensi yang dituju.

2.1.3 Kinerja Pemerintah Daerah

2.1.3.1 Pengertian Kinerja Pemerintah Daerah

Perbaikan kinerja anggaran dan pengelolaan keuangan daerah menduduki posisi penting dalam strategi pemberdayaan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan otonomi daerah dan mewujudkan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Perencanaan pengeluaran yang berorientasi pada kinerja akan meningkatkan kinerja anggaran daerah. Kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Menurut Hawkins (the oxford paperback dictionary, 1979) dalam Herminingsih (2009) mengemukakan pengertian kinerja adalah sebagai berikut: “*Performance is (1) the process or manner of performing, (2) a notable action or achievement, (3) the performing of a play or other entertainment*”. Sementara dalam buku modul Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik, disebutkan bahwa kinerja adalah pencapaian keluaran (*output*) atau dampak (*outcome*) yang diperoleh oleh orang atau sekumpulan orang dalam suatu organisasi yang melakukan kegiatan atau operasi demi pencapaian misi dan tujuan organisasi melalui pelaksanaan suatu urutan kegiatan yang terencana. Menurut Silalahi (2012) Kinerja juga

dapat diartikan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur.

Penilaian kinerja dapat dipakai untuk mengukur kegiatan-kegiatan organisasi dalam pencapaian tujuan dan juga sebagai bahan untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja organisasi merupakan suatu prestasi kerja dan proses penyelenggaraan untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Perkiraan jumlah alokasi dana untuk setiap unit kerja pemerintah daerah dan program kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu tingkat pelayanan publik, disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, sehingga identifikasi input, teknik produksi pelayanan publik dan tingkat kualitas minimal yang harus dihasilkan oleh suatu unit kerja pelayanan publik.

Pengeluaran pemerintah daerah dapat menciptakan ukuran kinerja yang akan mempermudah dalam melakukan kegiatan pengendalian dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah, maka kegiatan pemerintah dalam membangun daerah akan lebih dekat dengan masyarakat, artinya akan bersifat terbuka sehingga ketentuan publik masuk dalam penentuan strategis, prioritas dan kebijakan alokasi.

Menurut Arsyiaty, dkk (2008) kinerja instansi merupakan tingkat pencapaian hasil dari suatu kegiatan dalam sebuah instansi pemerintah sehubungan dengan penggunaan dana sesuai dengan kuantitas dan kualitas terukur dengan menggunakan prinsip efisiensi dan efektifitas. Sedangkan kinerja Pemerintah Daerah menurut Mahsun (2006: 25) Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi

yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Berdasarkan pengertian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah merupakan hasil dari pencapaian program/kebijakan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya pada suatu organisasi.

2.1.3.2 Indikator Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Mahsun (2006: 77), Indikator kinerja Pemerintah Daerah terdapat beberapa jenis yaitu:

1. Indikator masukan (*Input*), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.

Misalnya:

- a. Jumlah dana yang dibutuhkan.
 - b. Jumlah pegawai yang dibutuhkan.
 - c. Jumlah infrastruktur yang ada.
 - d. Jumlah waktu yang digunakan.
2. Indikator proses (*Process*). Dalam indikator ini, organisasi/ instansi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi/ instansi. Misalnya:
 - a. Ketaatan pada peraturan perundangan.
 - b. rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa
 3. Indikator keluaran (*Output*), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau non-fisik. Indikator ini digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Misalnya:

- a. Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan.
 - b. Ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.
4. Indikator hasil (*Outcomes*), segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator ini, organisasi/instansi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.

Misalnya:

- a. Tingkat kualitas produk atau jasa yang dihasilkan.
 - b. Produktivitas para karyawan atau pegawai.
5. Indikator manfaat (*Benefit*), adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Misalnya:
- a. Tingkat kepuasan masyarakat.
 - b. Tingkat partisipasi masyarakat.
6. Indikator dampak (*Impact*), pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.

Misalnya:

- a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menurunnya jumlah pengangguran.

Selain itu Palmer (1995) dalam Herminingsih (2009) menyebutkan bahwa indikator kinerja antara lain : (1) Indikator Biaya; (2) Indikator produktifitas; (3) Tingkat

penggunaan; (4) Target waktu; (5) volume pelayanan; (6) Kebutuhan pelanggan; (7) Indikator kualitas pelayanan; (8) Indikator kualitas pelanggan dan (9) Indikator pencapaian tujuan.

Menurut Ulum MD (2004: 281) dalam Ratih (2012), Ada enam indikator dasar yang perlu diikuti pemerintah daerah dalam membangun sistem pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

1. Memperkirakan kesiapan organisasi

Keberhasilan dalam menerapkan sistem pengukuran kinerja tergantung pada tingkat kesiapan organisasi. Kesiapan berarti dimilikinya kombinasi yang tepat dari orang, manajerial dan perlengkapan pada tempatnya.

2. Merumuskan tujuan

Tujuan pengembangan sistem pengukuran kinerja harus dirumuskan secara jelas. Apakah sarannya untuk menyempurnakan pembuatan keputusan, perencanaan, manajemen, penyusunan anggaran.

3. Mengembangkan rencana kerja

Mencakup pengelolaan proyek, kepegawaian, rencana kerja, anggaran, pelatihan, strategi dan kriteria pemantauan.

4. Merumuskan misi, tujuan sasaran

Tujuan dan sasaran akan memperlihatkan arah dan dapat menciptakan antusiasme untuk adanya penyediaan pelayanan publik yang berkualitas tinggi.

5. Mengenali pengukuran

Memperhitungkan sumber-sumber daya yang digunakan dalam pelayanan yang tersedia.

6. Pemantauan dan evaluasi

Pemantauan yang cermat menyebabkan perbaikan sasaran, ukuran, target kinerja prosedur pengumpulan bentuk pelaporan dan rencana-rencana penyempurnaan dalam memberi respon terhadap suatu masalah yang ditentukan dengan kondisi yang berbeda-beda.

2.2 Kajian Penelitian Terdahulu

Hasil-hasil penelitian sebelumnya dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Tinjauan peneliti terdahulu berupa tahun penelitian, nama penelitian dan hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3: Review Peneliti Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1.	Asri Eka Ratih (2012)	Pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, penatausahaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah terhadap Kinerja skpd pada pemerintahan Provinsi kepulauan riau	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, penatausahaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah berpengaruh secara simultan terhadap kinerja SKPD. Sedangkan secara parsial penatausahaan keuangan daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja SKPD.
2	Muthi, Risla, 2012.	Pengaruh Pengawasan Intern Dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah”.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan Intern Dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah mempengaruhi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah secara positif dan signifikan.

3	Hermin ingsih (2009)	Pengaruh partisipasi dalam penganggaran Dan peran manajerial pengelola keuangan daerah Terhadap kinerja pemerintah daerah (studi empiris pada pemerintah kabupaten demak)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi dalam penganggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.
---	----------------------------	---	---

(sumber: Olahan, 2014)

2.3 Kerangka Berpikir

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual dengan proses elektronik dalam pengambilan data pembukuan dan pelaporan semua transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas seluruh entitas Pemerintah Daerah.

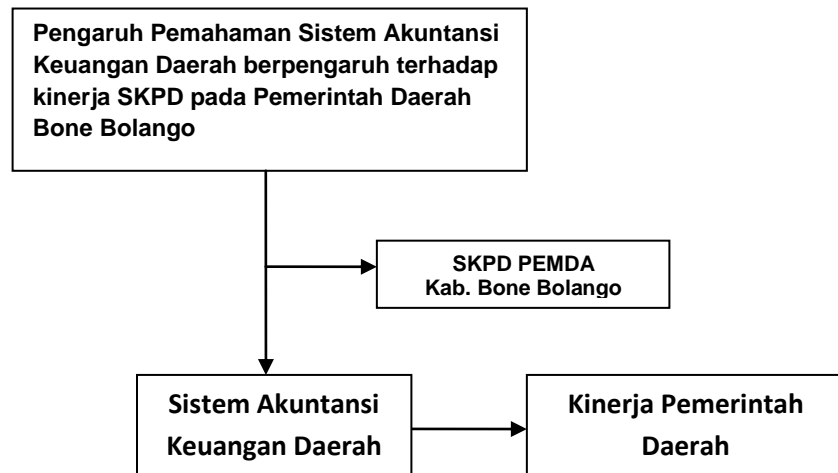
Hal ini terbukti bahwa akuntansi menjadi lebih diperlukan saat ini, untuk menjalin komunikasi antara pihak eksternal dan internal dari sebuah organisasi, dengan adanya sistem akuntansi maka informasi dari sebuah organisasi tersedia dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan baik pihak eksternal dan internal. Menurut Mulyadi (2001: 19) dalam widyaningsih (2011), bahwa tujuan umum pengembangan sistem akuntansi diantaranya adalah untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru dan untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasinya.

Dalam mengelola keuangan daerah yang baik dibutuhkan yang namanya sistem akuntansi yang mengatur keuangan daerah agar tercapainya pengelolaan keuangan daerah

yang baik. Dalam hal ini pemahaman sistem akuntansi berperan dalam kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah sekaligus mengukur kinerja pemerintah daerah.

Para pemerintah dalam mengelola keuangan daerah memungkinkan tercapainya mekanisme penyelenggaraan pemerintah yang efisien dan efektif dengan menunjukkan kinerja manajerial yang baik pula. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan peran pengelola keuangan daerah dan system akuntansi keuangan daerah.

Kerangka pemikiran sebagaimana diuraikan diatas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1: Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Sesuai dengan tujuan penelitian, kajian teoritis, dan beberapa penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang dapat disusun dalam penelitian ini adalah diduga ada pengaruh pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT

3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan penelitian ini adalah untuk Mengetahui pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.

3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai 2 manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis yang akan dijelaskan sebagai berikut:

3 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan terutama dalam bidang akuntansi, khususnya dalam menambah wawasan untuk menyikapi isu-isu masa kini dalam mengembangkan akuntansi khususnya akuntansi sektor publik itu sendiri yang sering terjadi di lingkungan pemerintah daerah.

4 Manfaat Praktis

Bagi pembaca pada umumnya diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat dalam membangun bangsa ini lebih baik kedepannya dan juga sebagai literatur untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Untuk pemerintah daerah itu sendiri, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah menjadi lebih baik lagi dan juga sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kinerja kinerja SKPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango. menjadi lebih baik lagi.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memilih lokasi di SKPD Kabupaten Bone Bolango, karena penulis menganggap bahwa lokasi tersebut sangat cocok dengan ruang lingkup penelitian yang penulis lakukan. Penetapan tempat penelitian pada lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tempat tersebut dapat memberikan keterangan yang lengkap tentang masalah yang diteliti yakni data yang diperlukan cukup memadai, dan lokasi tersebut mudah dijangkau sehingga dari segi waktu, biaya dan tenaga cukup menunjang bagi penulis. Waktu penelitian pada Bulan oktober sampai dengan selesai.

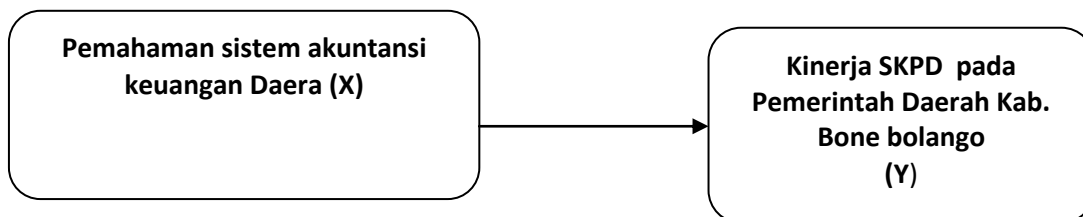
4.2 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau tehnik yang membantu peneliti tentang urutan bagaimana penelitian dilakukan. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah survey, metode survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya (Sugiyono, 2009: 6). Sedangkan metode analisis data dilakukan melalui metode pendekatan deskriptif kuantitatif, yaitu mengubah data kualitatif menjadi suatu ukuran data yang kuantitatif bertujuan memperoleh gambaran secara sistematis tentang fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang terjadi.

4.3 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti berusaha menggambarkan tentang bagaimana pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan kinerja SKPD pada pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango.

Menurut Sugiyono, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiono, 2012: 14). Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian yang akan digunakan berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik untuk dapat memberikan gambaran tentang seberapa besar pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja SKPD pada pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango dengan desain seperti pada gambar 2 berikut.



Gambar 2: Desain penelitian

4.4 Definisi Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Independen (Bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya perubahan variabel terikat dalam hal ini yang menjadi variabel bebas yaitu Sistem akuntansi keuangan daerah (X) adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatata, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (Kabupaten, Kota atau Provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi). Halim (2012: 40).
2. Variabel Dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya perubahan variabel bebas. Dalam hal ini yang menjadi variabel terikat adalah kinerja instansi pemerintah daerah (Y) yaitu Gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (*strategic planning*) suatu organisasi (Mahsun, 2006: 25).

Definisi operasional variabel dari penelitian ini untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
Pemahaman Sistem akuntansi keuangan	Sistem akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatata, dan	1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas 2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas	Ordinal Ordinal

daerah (x)	pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (Kabupaten, Kota atau Provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi). Halim (2012: 40)	3. Prosedur Akuntansi Aset Tetap/Barang Milik Daerah 4. Prosedur Akuntansi Selain Kas 5. Penyajian Laporan Keuangan Halim (2012: 84)	
Kinerja SKPD Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango(Y)	Kinerja pemerintah daerah adalah Gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (<i>strategic planning</i>) suatu organisasi."Mahsun (2006: 25)	1. Indikator masukan 2. Indikator proses 3. Indikator keluaran 4. Indikator hasil 5. Indikator manfaat 6. Indikator dampak Mahsun (2006: 77)	Ordinal

(Sumber: Data Olahan, 2014)

4.5 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2009: 61). Arikonto (2006) apabila jumlah populasi kurang dari 100, yang menjadi sampel adalah keseluruhan dari populasi tersebut atau disebut sampel total. Sedangkan jumlah populasi lebih dari 100, maka yang menjadi sampelnya adalah 10%-15% atau 20%-25%. Jumlah Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala SKPD, Sekretaris SKPD, Kepala Bagian/Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dari 26 SKPD yang berada di Kabupaten Bone Bolango, dengan jumlah

aparatus sebanyak 383 aparat yang dianggap memiliki peranan penting dalam pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan kinerja pemerintah daerah. Penetapan sampel dalam penelitian ini adalah $(383 \times 25\% = 95)$. Dengan demikian yang menjadi sampel penelitian yaitu sebanyak 95 orang aparat dari beberapa SKPD pada pemerintah daerah kabupaten Bone Bolango. Dalam pengambilan sampel sebanyak 95 orang aparat SKPD yang dilakukan oleh peneliti menggunakan penarikan sampel metode Random Sampling menurut Arikunto (2006).

4.6 Tehnik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

4.6.1 Tehnik Pengumpulan Data

Teknik penelitian adalah cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dan keterangan lainnya dalam penelitian terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan penelitian lapangan (*Field Research*) penulis memperoleh data primer dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango. Langkah-langkah dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan cara berikut:

- a. Angket, merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan penyebaran kuesioner (daftar pertanyaan) mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan alternatif jawaban yang telah disediakan.
- b. Pengamatan (*Observation*), yaitu teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dengan mencermati dokumen-dokumen yang ada.

4.6.2 Instrumen Penelitian

Menurut Arikunto (2006) bahwa instrumen adalah alat untuk memperoleh data pada waktu penelitian menggunakan suatu metode. Untuk memperoleh skor data dari variabel-variabel penelitian ini, digunakan instrumen dalam bentuk kuesioner dan menggunakan skala likert dengan rentang skor dari yang paling tinggi yaitu 1 sampai dengan 5. Menurut sugiyono (2010: 135), *Skala Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap fenomena sosial. Kuisisioner yang digunakan menggunakan 5 (lima) pilihan yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-Ragu (RR), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). Setiap pelihan akan diberikan bobot nilai yang diberikan bobot nilai yang berbeda seperti tampak pada tabel berikut:

Tabel 5: Pernyataan dengan Skala Likert

Skor/Bobot	Keterangan
5	Sangat Setuju
4	Setuju
3	Ragu-Ragu
2	Tidak Setuju
1	Sangat Tidak Setuju

Sumber: Data olahan, 2014

4.7 Prosedur Pengujian Instrumen Penelitian

Menurut Arikunto (2006) bahwa instrumen adalah alat untuk memperoleh data pada waktu peneliti menggunakan suatu metode. Dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel dalam pengumpulan, maka diharapkan hasil penelitian ini akan menjadi valid dan reliabel. Hal ini berarti bahwa dengan menggunakan yang telah teruji validasi dan reliabilitasnya, otomatis hasil (data) penelitian menjadi valid dan reliabel.

4.7.1 Uji Validasi Instrumen

Validasi menunjukkan sejauh mana alat pengukuran dapat mengukur apa yang diukur. Menurut Sugiyono (2004: 137) instrumen penelitian dikatakan valid apabila alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data valid. Oleh karena itu, untuk mendapatkan yang valid, peneliti menggunakan metode pengujian validasi isi (*content validity*) dengan analisis item, yaitu dengan mengoreksikan antara skor butir instrumen dengan skor total.

Menurut Masrun (1979) yang dikutip oleh Sugiyono (2004: 152) menyatakan: “Tehnik Korelasi untuk menentukan validasi item ini sampai sekarang merupakan tehnik yang paling banyak digunakan. Item yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium (skor total) serta korelasi yang tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validasi yang tinggi pula. Biasanya syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah $r = 0,3$ ”.

Maka berdasarkan pernyataan tersebut, apabila korelasi antara skor butir pertanyaan dengan skor total kurang dari 0,3 maka dinyatakan tidak valid dan harus dibuang atau dikeluarkan. Untuk menguji validasi maka dihitung koefisien korelasi antara masing-masing skor total dengan menggunakan teknik korelasi *Product Moment Pearson* yang dikemukakan oleh Sugiyono (2004: 212) dengan rumus sebagai berikut:

$$r = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{\{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2\} \{n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2\}}}$$

Keterangan:

r = korelasi Product Moment

$\sum X_i$ = jumlah skor item

$\sum Y_i$ = jumlah total skor jawaban

$\sum X_i^2$ = jumlah kuadrat total skor jawaban suatu item

$\sum Y_i^2$ = jumlah kuadrat total skor jawaban

$\sum X_i Y_i$ = jumlah perkalian skor jawaban suatu item dengan total skor

Selanjutnya dihitung dengan Uji-t dengan rumus:

$$t_{hitung} = \frac{\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t = Nilai t-hitung

r = Koefisien Korelasi hasil r-hitung

n = Jumlah Responden

Distribusi (tabel t) untuk $\alpha = 0,05$ dan derajat keabsahan ($dk = n - 2$) kaidah

Keputusan : jika, $t_{hitung} > \text{tabel}$ berarti valid, sebaliknya

$t_{hitung} < \text{tabel}$ berarti tidak valid

4.7.2 Uji Reliabilitas

Tinggi rendahnya reliabilitas, secara empiris ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut koefisien reliabilitas. Secara teoritis besarnya koefisien reliabilitas berkisar antara 0,00-1,00 (Rochaety(2007:50).

Menurut Arikunto (2007: 171) untuk menguji reliabilitas maka digunakan rumus *Alpha* sebagai berikut:

$$r = \frac{k}{(k - 1)} \left\{ \frac{\sum s_i^2}{s_i^2} \right\}$$

Keterangan:

$r_i r_i$ = Realibilitas Instrumen

k = banyaknya butir pertanyaan

$\sum s_i^2$ $\sum s_i^2$ = jumlah varians butir

s_i^2 s_i^2 = varians total

syarat minimum yang dianggap memenuhi syarat adalah kalau koefisien alpha cronbach's yang didapat 0,6. Jika koefisien yang didapat kurang dari 0,6 maka instrumen penelitiann tersebut dinyatakan tidak reliabel. Apabila instrumen ini sudah valid dan reliabel, maka dapat digunakan untuk pengukuran dalam rangka pengumpulan data.

4.8 Tehnik Analisis Data

Sebelum data analisis lebih lanjut menggunakan tehnik analisis data regresi linier sederhana, data tersebut harus sesuai dengan syarat-syarat yang dikehendaki dalam analisis regresi sebagai berikut:

4.8.1 Transformasi Data

Untuk mengukur variabel-variabel tersebut dilakukan penyebaran kuisisioner kepada responden. Data yang terkumpul adalah data dengan skala ordinal, sedangkan untuk menganalisis dalam penelitian ini diperlukan data dengan ukuran skala interval. Oleh karena itu seluruh variabel yang berskala ordinal terlebih dahulu dilakukan konversi untuk selanjutnya dinaikkan ketinggian pengukuran interval. Tehnik yang digunakan dalam konversi data ini adalah metode interval berurutan (*method successive intervals*) (Ibrahim, 2010: 29 dalam Nune, 2012).

$$NS = \frac{(\text{Density at lower limit}) - (\text{Density at upper limit})}{(\text{Area bellow upper limit}) - (\text{Area bellow lower limit})}$$

Keterangan:

Density at lower limit : Kepadatan batas bawah

Density at upper limit : Kepadatan batas atas

Area bellow upper limit : Daerah di bawah batas bawah

Area bellow lower limit : Daerah di bawah batas atas

4.8.2 Uji Normalitas

Salah satu asumsi yang harus dipenuhi dalam melakukan analisis regresi linear baik sederhana maupun berganda adalah data variabel dependen (terikat harus berasal dari populasi yang berdistribusi normal). Untuk itu, sebelum diolah lebih lanjut maka dilakukan pengujian asumsi normalitas tersebut dengan melakukan pengujian terhadap hipotesis sebagai berikut (Ibrahim, 2010. 31 dalam Nune, 2012):

Ho : Data variabel dependen berdistribusi normal

Hi : Data variabel dependen tidak berdistribusi normal

α : 5%

Kriteria : Tolak Ho jika nilai signifikansi yang diperoleh kecil dari α , terima Hi dalam hal lainnya

Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit, berdasarkan pengamatan empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka ($n > 30$), maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Bisa dikatakan sebagai sampel besar.

4.8.3 Analisis Regresi Sederhana

Penelitian ini menggunakan tehnik analisis data regresi linear sederhana. Regresi atau peramalan adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang apa yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang berdasarkan informasi masa lalu dan masa sekarang yang dimiliki agar kesalahannya dapat diperkecil, Riduwan dan Sunarto (2009).

Penggunaan tehnik ini karena dalam penelitian ini hanya digunakan satu variabel terikat (Kinerja SKPD pada Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango) dan satu variabel independen (Pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah). Model yang akan dibentuk sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2010: 261) adalah:

$$\text{Kinerja} = a + bx \text{ (Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah)}$$

Y : Variabel dependen (Kinerja SKPD pada Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango)

X : Variabel independen (Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah)

b : Angka arah atau koefisien regresi

a : *Intrrecept* atau konstanta

Untuk kemudahan dalam perhitungan digunakan jasa komputer berupa software dengan program IBM SPSS *Statistical version 20*.

4.9 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel independen terhadap dependen. Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana. Hipotesis statistik dirumuskan sebagai berikut:

Ho: tidak terdapat pengaruh positif variabel X (Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah) terhadap variabel Y (Kinerja SKPD pada Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango).

H α : terdapat pengaruh positif variabel X (Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah) terhadap variabel Y (Kinerja SKPD pada Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango).

Selanjutnya untuk mengetahui diterima atau tidak hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, dilakukan analisis data dengan menggunakan uji t. Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji t digunakan untuk membandingkan antara nilai *t hitung* dengan nilai *t tabel* dengan kaidah keputusan yaitu jika nilai *t hitung* \geq *t tabel*, maka H_0 ditolak dan H_a ditolak artinya tidak signifikan.

4.9.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengukur besarnya proporsi atau presentasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen maka dilakukan pengujian koefisien determinan. Koefisien determinan berkisar antara nol sampai dengan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Hal ini berarti $R^2 = 0$ menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap dependen, bila R^2 semakin besar mendekati 1, menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dan bila R^2 semakin kecil mendekati nol maka dapat dikatakan semakin kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

5.1.1 Gambaran Umum Lokasi penelitian

Bertitik tolak amanah UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah serta mengingat Undang undang Nomor 38 Tahun 2000 tanggal 22 Desember terbentuknya Daerah Provinsi Gorontalo yang kala itu hanya memiliki tiga daerah, sementara idealnya minimal memiliki lima Kabupaten/Kota maka atas semangat dan aspirasi seluruh kalangan masyarakat di empat kecamatan yang terdapat di Kabupaten Gorontalo masing-masing Kecamatan Suwawa, Kabila, Tapa dan Bone Pantai dibawah naungan Komite Solidaritas Pembentukan Kabupaten Baru (KSPKB) yang berusaha, berjuang menjadikan empat kecamatan ini untuk menjadi suatu daerah kabupaten. Maka tepat tanggal 25 Pebruari 2003 diresmikanlah Kabupaten Bone Bolango sebagai kabupaten yang keempat di Provinsi Gorontalo sesuai amanat Undang Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo.

Kabupaten Bone Bolango adalah salah satu wilayah yang terdapat di sebelah timur Kabupaten Gorontalo sebagai daerah induk yang kala itu sebagai wilayah kerja Pembantu Bupati Kepala Daerah Wilayah II yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Tapa, Suwawa, Kabila dan Bone Pantai yang berpusat di Kecamatan Kabila. Begitupun Wilayah I meliputi Kecamatan Limboto, Tibawa, Batudaa dan Telaga yang berpusat di Kecamatan Limboto, Wilayah III meliputi Kecamatan Kwandang, Atinggola dan Sumalata yang berpusat di Kecamatan Kwandang, dan Wilayah IV yang meliputi Kecamatan

Paguyaman, Tilamuta, Paguat, Marisa dan Kecamatan Popayato yang berpusat di Kecamatan Paguat. Dengan kehadiran terbentuknya Daerah Provinsi Gorontalo maka wilayah wilayah kerja pembantu Bupati tersebut memisahkan diri sebagai Daerah tersendiri termasuk Daerah Kabupaten Bone Bolango terkecuali Wilayah IV memecahkan diri lagi menjadi Kabupaten Bualemo dan Kabupaten Pohuwato.

Namun demikian walaupun telah terbentuknya berbagai daerah di Provinsi Gorontalo tetapi secara historis sesungguhnya masyarakat Gorontalo merupakan satu kesatuan yang utuh dan kokoh dilandasi oleh satu ikatan kekeluargaan yang disebut POHALAA yaitu Pohalaa Gorontalo, Pohalaa Limboto, Pohalaa Bone, Pohalaa Bolango dan Pohalaa Atingola.

Kabupaten Bone Bolango dengan Ibukota Suwawa, berbatasan dengan Kecamatan Atingola, kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bolalang mongondow sebelah utara, sebelah selatan berbatasan dengan teluk Tomini, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Telaga dan kecamatan Kota Utara sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bolaang mongondow selatan. Kabupaten Bone Bolango mempunyai luas wilayah 1.984,31 Km² memiliki jumlah penduduk sebesar 153.961 Jiwa yang dibagi atas 17 kecamatan, 5 kelurahan dan 130 desa.

5.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Adapun karakteristik responden yang menjadi responden penelitian ini berdasarkan jenis kelamin disajikan dalam tabel 6 berikut ini.

Tabel 6
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
Pria	65 Orang	65,42%
Wanita	30 Orang	31,15%
Jumlah	95 Orang	100 %

Sumber: Pengolahan data primer

Tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah responden pria sebesar 65 orang atau 65,42 % sedangkan responden wanita 30 orang atau 31,15 %. Berdasarkan jenis kelamin responden didominasi oleh Pria.

5.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambaran umum pegawai yang menjadi responden penelitian ini berdasarkan tingkat pendidikan disajikan dalam tabel 7 berikut ini.

Tabel 7
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
SMA/Sederajat	11 Orang	11,58 %
D3	22 Orang	23,16 %
S1	35 Orang	36,84 %
S2	19 Orang	0,2 %
S3	8 Orang	08,43%

Sumber: Pengolahan data primer

Tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah responden yang tingkat pendidikan SMA sebanyak 11 orang, pendidikan D3 sebanyak 22 orang, pendidikan S1 sebanyak 35 orang, pendidikan S2 sebanyak 19 orang dan pendidikan S3 sebanyak 8 orang.

5.1.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjabat

Gambaran umum pegawai yang menjadi responden penelitian ini berdasarkan usia disajikan dalam tabel 8 berikut ini.

Tabel 8

Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjabat

Lama Menjabat	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
< 1 Tahun	5 Orang	05 %
1 - 3 Tahun	29 Orang	30 %
3 - 5Tahun	36 Orang	38 %
> 5 Tahun	25 Orang	26 %
Jumlah	95 Orang	100 %

Sumber: Pengolahan data primer

Tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah responden yang menjabat kurang dari 1 tahun sebanyak 5 orang, menjabat 1-3 tahun sebanyak 29 orang, menjabat 3-5 tahun sebanyak 36 orang, dan yang menjabat lebih dari 5 tahun sebanyak 25 orang. Berdasarkan lama menjabat responden didominasi oleh responden yang menjabat antara 3-5 tahun.

5.1.4 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen

5.1.4.1 Hasil Pengujian Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian.

1. Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X)

Jumlah pernyataan yang digunakan untuk mengukur pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam penelitian ini sebanyak 7 pernyataan. Hasil pengujian validitas seluruh pernyataan tersebut pada tabel 9 sebagai berikut :

Tabel 9

Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pernyataan	r Hitung	r Tabel (n=20)	Keterangan
SAKDA-1	0,640	0.4	Valid
SAKDA-2	0,768	0.4	Valid
SAKDA-3	0,659	0.4	Valid
SAKDA-4	0,681	0.4	Valid
SAKDA-5	0,496	0.4	Valid
SAKDA-6	0,561	0.4	Valid
SAKDA-7	0,721	0.4	Valid

Sumber: Olahan, 2014

Dalam pengujian validitas, pernyataan dikatakan valid jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} . Nilai r_{tabel} didapatkan dari tabel dimana $n=20$ dan tingkat signifikan 5% maka nilai r_{tabel} sebesar 0.4. Dengan demikian dari 7 pernyataan yang digunakan untuk mengukur pengaruh dari variabel sistem akuntansi keuangan daerah, semua pernyataan telah memiliki nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} 0.4 sehingga dikatakan memenuhi uji validitas dan dapat digunakan untuk pengumpulan data penelitian.

2. Variabel Kinerja SKPD pada Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango (Y)

Jumlah pernyataan yang digunakan untuk mengukur pengaruh Kinerja SKPD pada Pemerintah Daerah Kab. Bone bolango dalam penelitian ini sebanyak 7 pernyataan. Hasil pengujian validitas dan reliabilitas seluruh pernyataan tersebut pada tabel 10 sebagai berikut :

Tabel 10

Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja SKPD pada Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango

Pernyataan	r Hitung	r Tabel (n=20)	Keterangan
KPD-1	0,781	0.4	Valid
KPD-2	0,837	0.4	Valid
KPD-3	0,855	0.4	Valid
KPD-4	0,798	0.4	Valid
KPD-5	0,753	0.4	Valid
KPD-6	0,750	0.4	Valid
KPD-7	0,735	0.4	Valid

Sumber: Olahan, 2014

Dalam pengujian validitas, pernyataan dikatakan valid jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} . Nilai r_{tabel} didapatkan dari tabel dimana $n=20$ dan tingkat signifikan 5% maka nilai r_{tabel} sebesar 0.4 Dengan demikian dari 7 pernyataan yang digunakan untuk mengukur pengaruh dari variabel Kinerja SKPD pada Pemerintah Daerah Kab. Bone bolango, semua pernyataan telah memiliki nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} 0.4 sehingga dikatakan memenuhi uji validitas dan dapat digunakan untuk pengumpulan data penelitian.

5.1.4.2 Hasil Pengujian Realibilitas

Hasil pengujian realibilitas dalam penelitian ini disajikan pada tabel 11 berikut ini:

Tabel 11

Hasil Uji Realibilitas

No.	Variabel	Koefisien Realibilitas	Keterangan
2	SAKD	0.759	Reliabel
3	KPD	0.790	Reliabel

Sumber: Olahan, 2014

Kriteria uji reliabilitas instrument menggunakan batas 0,6 jika Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6 maka pertanyaan dinyatakan reliabel. Koefisien reliabilitas atas pernyataan-pernyataan pada variabel bebas dan terikat adalah reliabel. Artinya pernyataan tersebut dapat digunakan untuk mengukur variabel-variabel bebas dan terikat dengan tingkat konsistensi yang sangat baik

5.1.5 Transformasi Data dengan Method of Successive Interval

Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa data primer yang didapatkan dari penyebaran angket penelitian. Data tersebut berupa data dengan skala ukur ordinal. Sedangkan salah satu syarat untuk dapat digunakannya analisis regresi adalah data diharuskan berskala ukur metrik (interval atau rasio). Oleh karena itu data yang diperoleh, diolah lebih lanjut, data dengan skala ukur ordinal dikonversi kedalam data skala ukuran interval dengan menggunakan metode MSI (*Method of Successive Interval*). Perhitungan dan hasil MSI dapat dilihat pada lampiran penelitian.

5.1.6 Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum data di analisis lebih lanjut menggunakan analisis regresi linier sederhana, data tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki dalam analisis regresi. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam regresi linier sederhana yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mengetahui normal tidaknya distribusi variabel dalam penelitian ini dilakukan dengan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S test). Jika nilai *Kolmogorov-Smirnov* signifikan pada taraf di atas 5% (0,05), maka data mengikuti distribusi normal, dan sebaliknya jika nilai *Kolmogorov-Smirnov* signifikan pada taraf 5% atau dibawahnya berarti data mengikuti distribusi tidak normal. Hasil uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

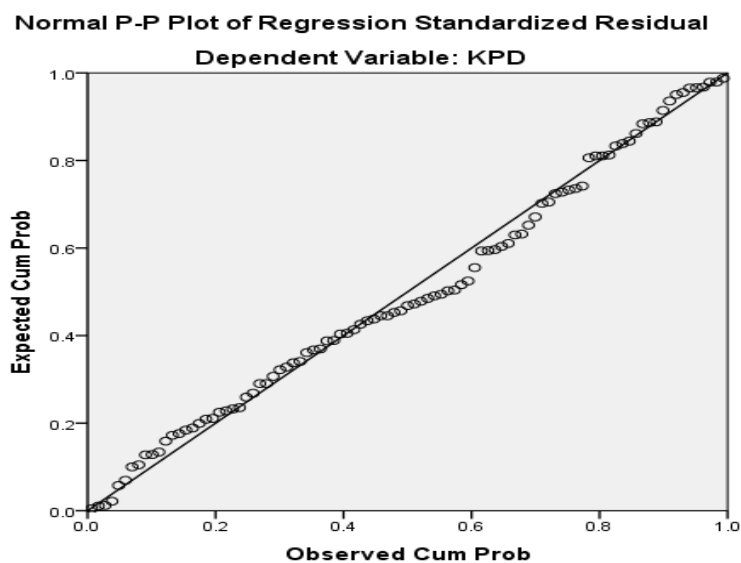
		SAKDA	KPD
N		95	95
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	23.2243	21.0964
	Std. Deviation	5.01100	4.02671
Most Extreme Differences	Absolute	.106	.112
	Positive	.106	.112
	Negative	-.093	-.098
Kolmogorov-Smirnov Z		1.031	1.094
Asymp. Sig. (2-tailed)		.238	.182

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel 13 diatas menunjukkan nilai *Kolmogorov-Smirnov* untuk masing-masing varabel memiliki tingkat signifikan berada di atas 5% (0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dalam variabel ini mengikuti distribusi normal.

Selain dengan nilai *Kolmogorov-Smirnov*. Metode yang lebih handal untuk melengkapi uji *Kolmogorov-Smirnov* adalah dengan melihat *Normal Probability Plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2001). Hasil *Normal Probability Plot* untuk uji normalitas adalah sebagai berikut:



Berdasarkan gambar 3 tersebut dapat dilihat bahwa data (titik) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Dengan mengikuti dasar pengambilan keputusan di atas, maka disimpulkan bahwa data dalam model regresi ini memenuhi asumsi normalitas data.

1. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas.

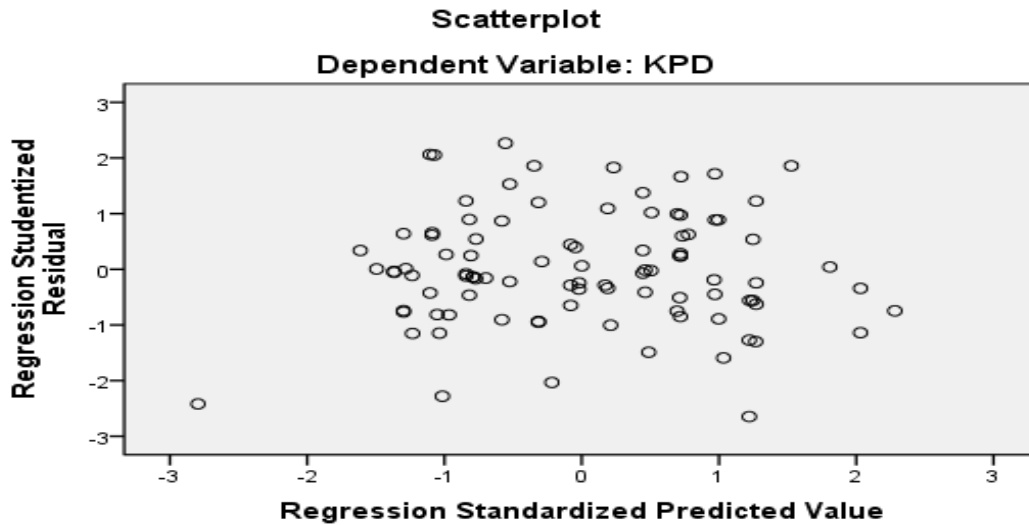
Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode scatter plot dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan SRESID (nilai residualnya). Model yang baik didapatkan jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik, seperti mengumpul di tengah, menyempit kemudian melebar atau sebaliknya melebar kemudian menyempit.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendeteksi adanya penyimpangan asumsi klasik heterokedastisitas adalah dengan metode chart (*diagram scatterplot*), dengan dasar pemikiran bahwa:

- a. Jika ada pola tertentu yang beraturan pada titik-titik yang menyebar (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka terjadi heterokedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar ke atas dan di bawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 3 Hasil Pengujian Heterokedastisitas



Berdasarkan gambar 4 tersebut terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik-titik yang ada menyebar ke atas dan di bawah 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

5.1.7 Pengujian Hipotesis

Setelah syarat-syarat dalam uji asumsi klasik terpenuhi tahap selanjutnya adalah melakukan evaluasi dan interpretasi model regresi. Model regresi dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh variabel pemahaman sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X), terhadap variabel dependen kinerja SKPD pada Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango (Y). Pengujian hipotesis ditujukan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian ini dilakukan dengan bantuan program IBM SPSS version 20.

Kriteria pengambilan keputusan dalam melakukan penerimaan dan penolakan setiap hipotesis dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} untuk masing-masing koefisien regresi. Apabila t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} , maka hipotesis nol (H_0) atau ditolak, dan apabila t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} , maka H_1 atau diterima.
2. Selain kriteria perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} , cara yang kedua yaitu dengan menggunakan kriteria nilai *p value* (kekuatan koefisien regresi dalam menolak H_0). Jika *p value* < 0,05 maka H_0 ditolak dan apabila *p value* > 0,05 maka H_0 diterima.

Adapun hasil Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13
Pengujian Hipotesis

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.760	1.939		8.952	.000
	SAKDA	.161	.082	.200	2.971	.052

a. Dependent Variable: KPD

Berdasarkan tabel 13 maka diperoleh persamaan regresi untuk melihat pengaruh pemahaman sistem Akuntansi keuangan daerah terhadap Kinerja SKPD pada Pemerintah Daerah Kab. Bone bolango sebagai berikut:

$$Y = 0.760 + 0.161 X \text{ (Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah)}$$

Persamaan regresi yang diperoleh dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (A) pada persamaan ini sebesar .760 menjelaskan nilai rata-rata kualitas laporan keuangan pada saat Sistem Akuntansi keuangan Pemerintahan konstan (Tidak berubah) atau sama dengan nol adalah sebesar 760
2. Koefisien regresi untuk variabel sistem Akuntansi keuangan Daerah (bx) bertanda positif sebesar 0,161. Dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa variabel pemahaman sistem Akuntansi keuangan daerah (X) berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Daerah Kab. Bone bolango (Y). Hal ini menunjukkan perubahan Kinerja SKPD pada Pemerintah Daerah Kab. Bone bolango (Y) jika pemahaman sistem Akuntansi keuangan daerah (X) meningkat sebesar satu satuan. Jadi jika skor pemahaman sistem akuntansi keuangan Pemerintahan daerah meningkat sebesar 1 (satu) satuan maka akan terjadi peningkatan pada kinerja SKPD pada Pemerintah Daerah Kab. Bone bolango sebesar 0.161. Semakin baik pemahaman sistem Akuntansi keuangan Pemerintah daerah (bx) maka kinerja SKPD pada Pemerintah Daerah Kab. Bone bolango akan semakin baik.

Hasil analisis di atas juga dapat diketahui nilai t_{hitung} untuk variabel Akuntansi keuangan Pemerintahan daerah adalah sebesar 2.971 Sedangkan nilai t_{tabel} pada tingkat signifikansi 5% dan derajat bebas $n-k-1 = 95-1-1= 93$ sebesar 1.985. Jika kedua nilai t ini dibandingkan maka nilai t_{hitung} masih lebih besar dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sehingga hipotesis H_0 yang menyatakan tidak ada pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan pemerintahan daerah terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Daerah Kab. Bone bolango pada pemerintah kabupaten bone bolango ditolak. Selain itu apabila kita membandingkan nilai signifikan (P_{value}), maka dapat dilihat bahwa nilai P_{value} dari pengujian ini lebih kecil

dari 0.05. Dengan kata lain pada tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pemahaman sistem akuntansi keuangan pemerintahan daerah terhadap kinerja SKPD pada pemerintah daerah kabupaten bone bolango.

5.1.8 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi untuk mengukur besarnya proporsi atau pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Setelah diketahui bahwa terdapat pengaruh yang positif dari pemahaman sistem akuntansi keuangan pemerintahan daerah terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Daerah Kab. Bone bolango, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis besar pengaruh yang ditimbulkan oleh pemahaman sistem akuntansi keuangan pemerintahan daerah terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Daerah Kab. Bone bolango. Untuk keperluan tersebut digunakan analisis koefisien determinasi.

Nilai koefisien determinasi merupakan suatu nilai yang besarnya berkisar antara 0% - 100%. Semakin besar nilai koefisien determinasi suatu model regresi menunjukkan bahwa pengaruh dari variabel bebas yang terdapat dalam model terhadap variabel tidak bebasnya juga semakin tinggi. Untuk mengetahui besarnya koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14
Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.200 ^a	.400	.300	3.96631

a. Predictors: (Constant), SAKDA

b. Dependent Variable: KPD

Tabel di atas menunjukkan bahwa besarnya koefisien determinasi atau angka *R Square* adalah sebesar 0.40. Hal ini menunjukkan besarnya pengaruh kinerja SKPD pada Pemerintah Daerah Kab. Bone bolango diperoleh presentase sebesar 0,40 % dan sisanya sebesar 60% (100-40,0) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

5.2 Pembahasan

5.2.1 Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Daerah Kab. Bone bolango

Menurut Suwardjono (2005: 159) dalam Syahrida (2009) menegaskan bahwa akuntansi akan mempunyai peran yang nyata dalam kehidupan sosial ekonomi kalau informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dapat mengendalikan perilaku pengambil kebijakan ekonomi untuk bertindak menuju ke suatu pencapaian tujuan sosial dan ekonomi negara. Salah satu tujuan ekonomi negara adalah alokasi sumber daya ekonomi secara efisien sehingga sumber daya ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dapat dinikmati masyarakat secara optimal. Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pentingnya sistem akuntansi yang baik, guna mencapai kesejahteraan masyarakat, karena dengan sistem akuntansi dapat mengendalikan para pelaku pengambil kebijakan ekonomi yaitu pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi agar dapat dinikmati oleh masyarakat.

Menurut Halim (2012: 40) akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (Kabupaten, Kota atau Provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi).

Pegawai pada suatu instansi pemerintah daerah sebaiknya harus memahami tentang sistem akuntansi keuangan daerah, karena sistem akuntansi sebagai bahan pertanggungjawaban pemerintah dalam menjalankan amanah masyarakat untuk mengelola keuangan daerah yaitu APBD sebaik mungkin sehingga program-program yang dijalankan dapat terealisasi dengan baik.

Dari hasil jawaban responden, Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara keseluruhan masih terletak pada kriteria yang cukup baik. Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pemahamannya tentang sistem akuntansi terutama dalam pengelolaan aset, pelaporan keuangan dan memahami prosedur yang harus dilakukan untuk menjembatani kas basis keakrual basis.

Selanjutnya, berdasarkan pengujian hipotesis nilai t-hitung untuk variabel Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebesar 2,971. Jika dibandingkan dengan nilai t-tabel yang sebesar 1,985. Maka t-hitung yang diperoleh jauh lebih besar dari nilai t-tabel kemudian terlihat pula bahwa Nilai signifikansi lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai $0,020 < 0,05$, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. Sehingga variabel pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah) memiliki kontribusi terhadap Y (kinerja SKPD pada Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango). Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X

mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan pada tingkat kepercayaan 95%, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango¹.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asri Eka Ratih(2012) yang berjudul “Pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, penatausahaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah terhadap Kinerja SKPD pada pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja SKPD. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang baik maka akan meningkatkan kinerja SKPD pada Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima.

Adapun besarnya pengaruh yang ditimbulkan oleh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango sebesar 40%. Melihat hasil penelitian dan nilai presentase pengaruh yang ditimbulkan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah sangat diperlukan dalam kinerja SKPD pada Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango. Penilaian kinerja dapat dipakai untuk mengukur kegiatan-kegiatan organisasi dalam pencapaian tujuan dan juga sebagai bahan untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja organisasi merupakan suatu prestasi kerja dan proses penyelenggaraan untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Perkiraan jumlah alokasi dana untuk setiap unit

kerja pemerintah daerah dan program kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu tingkat pelayanan publik, disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, sehingga identifikasi input, teknik produksi pelayanan publik dan tingkat kualitas minimal yang harus dihasilkan oleh suatu unit kerja pelayanan publik.

Sejalan penelitian Arsyiaty, dkk (2008) kinerja keuangan instansi merupakan tingkat pencapaian hasil dari suatu kegiatan dalam sebuah instansi pemerintah sehubungan dengan penggunaan dana sesuai dengan kuantitas dan kualitas terukur dengan menggunakan prinsip efisiensi dan efektifitas. Sedangkan kinerja Pemerintah Daerah menurut Mahsun (2006: 25) Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Berdasarkan pengertian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah merupakan hasil dari pencapaian program/kebijakan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya pada suatu organisasi

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan membuktikan bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja SKPD pada pemerintah daerah kabupaten bone bolango. Hasil ini sebagaimana dibuktikan dengan pengujian hipotesis dimana nilai t_{hitung} masih lebih besar dari nilai t_{tabel} . Sehingga hipotesis dalam penelitian terdapat pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah terhadap kinerja SKPD pada pemerintah daerah kabupaten bone bolango diterima. Koefisien regresi (β_x) menunjukkan arah positif sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah pada pemerintah daerah kabupaten bone bolango dilaksanakan dengan baik akan dapat meningkatkan kinerja SKPD pada pemerintah daerah kabupaten bone bolango. Hal ini dibuktikan dengan hasil koefisien regresi sebesar 0,161 menunjukkan setiap peningkatan 1% pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah akan mampu meningkatkan kinerja SKPD pada pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango sebesar 0,161%. Berdasarkan koefisien determinasi, besarnya pengaruh kinerja SKPD pada pemerintah daerah kabupaten bone bolango menunjukkan presentase sebesar 40%.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. DPPKAD kabupaten bone bolango harus lebih memahami sistem akuntansi keuangan daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang lebih berkualitas dan akuntabel.
2. DPPKAD kabupaten bone bolango kiranya dapat lebih konsisten melaksanakan sistem akuntansi keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku secara umum untuk meningkatkan kinerja SKPD pada pemerintah daerah kabupaten bone bolango.
3. Dalam penelitian ini sebanyak 60% faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian kembali berkaitan dengan judul ini kiranya dapat menambahkan variabel lain seperti pengelolaan keuangan daerah, penatausahaan keuangan daerah dll.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo, Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala SKPD, Sekretaris SKPD, Kepala Bagian/Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dari 26 SKPD yang berada di Kabupaten Bone Bolango, dengan jumlah aparat sebanyak 383 aparat yang dianggap memiliki peranan penting dalam pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah, sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 95 orang aparat dari beberapa SKPD pada pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang dibagikan kepada responden serta didukung oleh data sekunder yang ada pada pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo dengan menggunakan regresi sederhana. Penelitian ini diduga bahwa pemahaman sistem akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SKPD pada pemerintah daerah kab. Bone bolango. Hal ini dibuktikan dengan hasil koefisien regresi sebesar 0,161 menunjukkan setiap peningkatan 1% pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah akan mampu meningkatkan kinerja SKPD pada pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango sebesar 0,161%.

Kata Kunci: SAKDA, Kinerja SKPD

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan penelitian ini. Tak lupa pula shalawat dan salam saya khaturkan kepada Rasulullah SAW, sebagai Nabi akhir zaman.

Penyusunan laporan ini dimaksudkan sebagai bukti pertanggungjawaban kami dalam menjalankan amanah selaku tim peneliti, sekaligus sebagai tindak lanjut dari surat keputusan dekan fakultas ekonomi dan bisnis universitas negeri gorontalo

Secara riil disadari bahwa dalam laporan penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kritikan dan saran yang bersifat membangun dari pembaca, peneliti menerima dengan senang hati demi perbaikan penulisan selanjutnya. Dan semoga laporan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan berbagai pihak yang berkeinginan untuk menyempurnakan keterbatasan hasil penelitian ini. A..min.

Gorontalo, Nopember 2014

Peneliti

**LAPORAN HASIL PENELITIAN
DANA PENELITIAN PNBP FAKULTAS**



**PENGARUH PEMAHAMAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
TERHADAP KINERJA SKPD PADA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

Oleh

USMAN, S.Pd.,SE., MSi

LUKMAN PAKAYA, S.Pd.,MSA

**JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

2014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..	i
HALAMAN PENGESAHAN.	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI..	v
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar.....	.ix
Daftar Lampiran.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.4 Latar Belakang	1
1.5 Identifikasi Masalah	7
1.6 Rumusan Masalah	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.2 Pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah	8
2.2.1 Prosedur akuntansi keuangan daerah	13
2.1.2 Ciri-Ciri Akuntansi Keuangan Daerah.....	14
2.1.3 Kinerja Pemerintah Daerah.....	17
2.1.3.1 Pengertian Kinerja Pemerintah Daerah.....	17
2.1.3.2 Indikator Kinerja Pemerintah Daerah.....	19
2.2 Kajian Penelitian Terdahulu.....	22
2.3 Kerangka Berpikir.....	23
2.4 Hipotesis.....	24

BAB III TUJUAN DAN MANFAAT	25
3.3 Tujuan Penelitian	25
3.4 Manfaat Penelitian.....	25
BAB IV METODE PENELITIAN	26
4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	26
4.2 Metode Penelitian	26
4.3 Desain Penelitian.....	27
4.4 Definisi Operasional Variabel.....	28
4.5 Populasi dan Sanpel.....	29
4.6 Teknik Pengumpulan Data dan instrument Penelitian.....	30
4.6.1 Teknik Pengumoulan Data.....	30
4.6.2 Instrumen Penelitian.....	31
4.7 Prosedur Pengujian instrument Penelitian.....	32
4.7.1 Uji Validitas instrumen.....	32
4.7.2 Uji Reabilitas.....	34
4.8 Teknik Analisa Data.....	35
4.8.1 transformasi data.....	53
4.8.2 Uji Normalitas.....	53
4.8.3 Analisis Regresi Sederhana.....	36
4.9 Pengujian Hipotesis.....	37
4.9.1Koefisien Determinasi.....	38
BAB V Hasil dan Pembahasan.....	39
5.1 Hasil Penelitian.....	39
5.1.1 Gambaran Umum lokasi Penelitian.....	39
5.1.2 Karakteristik Responden berdasar Jenis Kelamin.....	40

5.1.3 Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat pendidikan.	41
5.1.4 karakteristi Responden berdasar Lama menjabat.	42
5.1.4.1 hasil pengujian Validitas.....	42
5.1.4.2 Hasil Pengujian Realibilitas.....	44
5.1.5 Transformasi data dengan metode MSI.....	45
5.1.6 Hasil uji asumsi klasik.....	45
5.1.7 Pengujia Hipotesis.....	49
5.1.8 Hasil Koefisien Determinasi.....	52
5.2 Pembahasan.....	53
5.2.1 Pengaruh Pemahaman SAKDA Terhadap Kinerja SKPD Boalemo.....	53
BAB VI Kesimpulan dan Saran.....	57
6.1 Simpulan.....	57
5.2 Saran.....	58
Daftar Pustaka	59

KUESIONER

Mohon di isi dengan memberikan tanda silang (X) pada pertanyaan pilihan dan jawablah secara singkat dan jelas pada pertanyaan isian.

A. Demografi Responden

Nama Responden :(jika tidak keberatan)

Latar Pendidikan :

Jabatan Responden :

Lama Menjabat :

Tanggal Pengisian :

Kursus/Diklat/Bintek di bidang akuntansi, dan pengelolaan keuangan yang telah Bapak/Ibu ikuti (berilah tanda silang (X)):

- Jabatan :
- Tidak Pernah
 - Minim Sekali
 - Sering
- Strata Pendidikan :
- Kepala Badan/Dinas/Instansi
 - Sekertaris/Kabid/Kabag
 - Kasubbid/Kasubbag/Kasubdis/Kasi
- SMA/Sederajat
 - Diploma (D3)
 - Sarjana (S1)
 - Pasca Sarjana (S2)
 - Doktoral (S3)
 - Lain-lain.....

B. KUESIONER SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Menurut Halim (2012: 40) system akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (Kabupaten, Kota atau Provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi).

Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan tanggapan yang sesuai atas pernyataan-pernyataan berikut dengan memilih skor yang tersedia dengan cara disilang (X). Jika menurut Bapak/Ibu tidak ada jawaban yang tepat, maka jawaban dapat diberikan pada pilihan yang paling mendekati. Skor jawaban adalah sebagai berikut :

Angka 1 = SangatTidakPaham (STP)

Angka 2 = TidakPaham (TP)

Angka 3 = Netral (N)

Angka 4 = Paham (P)

Angka 5 = Sangat Paham

No	Uraian	1	2	3	4	5
1	Saya memahami sistem dan prosedur Akuntansi penerimaan kas					
2	Saya memahami sistem dan prosedur Akuntansi pengeluaran kas					
3	Saya memahami sistem dan prosedur akuntansi asset tetap					
4	Saya memahami sistem dan prosedur Akuntansi selain kas					
5	Saya memahami penyajian laporan keuangan					
6	Saya memahami sistem pencatatan double entry					

7	Saya memahami prosedur yang harus dilakukan untuk menjembatani kas basis keakrual basis					
---	---	--	--	--	--	--

C. KUESIONER KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Kinerja Pemerintah Daerah adalah prestasi kerja yang dicapai pemerintah daerah dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan.

Mohon Bapak/ Ibu memilih jawaban yang paling tepat dengan member tanda silang (X) nomor yang tersedia, sesuai dengan praktek yang terjadi selama ini.

1 = sangat jelek

2 = jelek

3 = rata-rata

4 = baik

5 = sangat baik.

No	Pertanyaan	1	2	3	4	5
1	Keterlibatan aparatur pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan anggaran.					
2	Anggaran yang ditetapkan dalam penyusunan anggaran sejalan dengan hasil penjaringan aspirasi masyarakat.					
3	Hasil penyusunan anggaran dalam pelayanan produk layanan (proyek) yang dibangun sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam APBD.					
4	Partisipasi penyusunan anggaran sebagai manifestasi aspirasi dan kepentingan masyarakat/publik telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan publik.					
5	Kinerja dari partisipasi penyusunan anggaran yang diberikan kepada masyarakat/publik telah memberikan manfaat atau kegunaan yang tepat lokasi dan tepat waktu					
6	Produk anggaran sebagai hasil kerja yang dijalankan oleh unit kerja selalu dapat dirasakan secara merata oleh					

	masyarakat.					
7	Dampak nyata dari hasil kinerja partisipasi penyusunan anggaran dapat memberikan kontribusi yang memadai kepada masyarakat/publik, sesuai dengan visi, misi dan tujuan dari unit kerja masing-masing.					

Terima Kasih

DAFTAR TABEL

TABEL 1 Penilaian BPK terhadap kinerja pemerintah daerah bone bolango.....	4
Tabel 2 LRA Pemerintah Bone Bolango.....	6
Tabel 3 Review Peneliti terdahulu.....	22
Tabel 4 definisi operasional variabel.....	28
Tabel 5 pernyataan dengan skala likert.....	31
Tabel 6 karakteristik responden berdasar jenis kelamin.....	41
Tabel 7 karakteristik responden berdasar tingkat pendidikan.....	41
Tabel 8 karakteristik responden berdasar lama menjabat.....	42
Tabel 9 hasil uji validitas pemahaman SAKDA.....	43
Tabel 10 hasil validitas kinerja SKPD.....	44
Tabel 11 hasil pengujian Reliabilitas.....	44
Tabel 12 hasil uji Normalitas.....	46
Tabel 13 pengujian hipotesis.....	50
Tabel 14 koefisien determinasi.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 krangka pemikiran.	24
Gambar 2 desain penelitian.	27
Gambar 3 hasil pengujian Hetero kedastisitas.	49

Daftar Lampiran

Kuesioner	60
Tabulasi Data Variabel x dan y.	64
SK Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG.	68